

LAPORAN KINERJA



**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN JEMBER**

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Pembangunan sektor agama mempunyai kedudukan yang strategis dalam pembangunan nasional, karena merupakan landasan spiritual, etik dan moral. Ini berarti pembangunan sektor agama sangat menentukan tingkat keberhasilan pembangunan secara keseluruhan.

Oleh sebab itu dibutuhkan bahan informasi dan kajian dalam melaksanakan pembangunan sektor agama, yang dapat dijadikan sumber perencanaan dan tolok ukur pelaksanaan dan keberhasilan pembangunan. Berkenaan dengan hal tersebut, evaluasi dan kajian permasalahan haruslah disusun dengan harapan dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi masyarakat dan bahan kajian bagi pelaksana pembangunan.

Besar harapan kami, laporan kinerja yang berisi evaluasi dan kajian ini dapat bermanfaat khususnya bagi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember beserta seluruh satker, dan pihak lain yang terkait pada umumnya.

Akhir kata, kami sebagai manusia biasa tentu takkan bisa melakukan sesuatu dengan sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak tentulah sangat kami harapkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jember, 31 Januari 2023
Kepala,



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Tugas	7
1.3 Fungsi	9
1.4 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	10
1.5 Sarana dan Prasarana	11
1.6 Sistematika Penyusunan LKJ.....	14
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	15
2.1 Visi dan Misi	15
2.2. Sasaran Strategis	16
2.3. Perencanaan Kinerja.....	18
2.4. Penetapan Kinerja	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	30
3.1. Pengukuran kinerja	30
3.2. Analisis kinerja	37
3.3. Akuntabilitas keuangan.....	38
BAB IV P E N U T U P	44
LAMPIRAN	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, maka sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta realisasi program kerja, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember telah menetapkan Visi dan Misi dan organisasinya.

Adapun Visi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember adalah: “Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”.

Adapun Misi atau tujuan dan sasaran yang akan dicapai sebagai landasan operasionalnya adalah meliputi :

1. meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama;
2. memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata;
4. meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu;
5. meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan;
6. memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

(Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2022)

Keberhasilan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut tidak terlepas dari faktor yang mendukung antara lain :

- a. Tersedianya dana yang mencukupi
- b. Tersedianya sumber daya manusia yang memadai
- c. Tersedianya sarana dan prasarana
- d. Terbinanya koordinasi yang baik dan mantap

Selain terdapat adanya faktor-faktor pendukung tersebut diatas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember juga menghadapi beberapa kendala-kendala, terutama sejak terjadinya reformasi mengakibatkan perubahan-perubahan yang cepat dari segala aspek kehidupan masyarakat baik bidang sosial, ekonomi, budaya dan politik.

Untuk memberikan pelayanan dan memenuhi tuntutan serta kebutuhan masyarakat yang tinggi, kendala yang dihadapi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember, antara lain :

1. Terbatasnya dana, sarana dan prasarana serta alat transportasi.
2. Sumber daya manusia masih belum bekerja dengan optimal.
3. Komunikasi dan informasi antar umat beragama belum optimal.
4. Efektivitas koordinasi antara pusat dan daerah yang masih belum optimal.

Dalam rangka mengatasi kendala tersebut diatas, maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan efisiensi dan efektifitas keuangan.
2. Mengoptimalkan sumber-sumber daya yang dimiliki.
3. Meningkatkan SDM bagi pegawai dan guru.
4. Meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait, baik di pusat maupun di daerah.

Dengan telah ditetapkan tujuan, sasaran dan program serta potensi dari aspek pendukung maupun tantangan dan kendala yang dihadapi serta alternatif pemecahan masalah, diharapkan tujuan, sasaran program akan tercapai sesuai yang diharapkan.

Dengan demikian penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) Tahun 2022 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember dapat memberikan gambaran yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Bangsa Indonesia saat ini dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang dinamis dan sangat mempengaruhi dunia birokrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain : transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga aktor tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari *Good Governance* tersebut dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Pemerintahan yang bersih atau *good governance* ditandai dengan tiga pilar utama yang merupakan elemen dasar yang saling berkaitan. Ketiga elemen dasar tersebut adalah partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Audit kinerja lahir sebagai wujud ketidakpuasan atas hasil audit keuangan, yang hanya memberikan opini atau menilai kewajaran laporan keuangan. Padahal masyarakat ingin tahu apakah uang negara (hasil pungutan pajak mereka) di kelola dengan baik dan benar. Apakah uang negara itu digunakan untuk memperoleh sumber daya secara ekonomis, digunakan secara efektif. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP Pasal 50 ayat (2) menyatakan bahwa audit kinerja adalah audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi dan efektifitas.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan

serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu jelas diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Dalam rangka pelaksanaan Inpres ini, telah ditetapkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 489 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja Di Lingkungan Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama).

Sesuai dengan dinamika perkembangan yang terjadi, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 disempurnakan dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 489 Tahun 2000 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja Di Lingkungan Departemen Agama. Dalam pelaksanaannya, penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu dilakukan penyempurnaan sehingga Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Dokumen ini merupakan gambaran dari keberhasilan atau kegagalan setiap pencapaian sasaran strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2022 juga sebagai hasil analisis dan evaluasi atas keberhasilan/kegagalan setiap pencapaian sasaran, sekaligus sebagai usulan pemecahan masalah untuk perbaikan berkelanjutan dalam peningkatan akuntabilitas kinerja tahun berikutnya.

Laporan Kinerja (LKj) Kementerian merupakan suatu bentuk pertanggung-jawaban Instansi Pemerintah yang berisi informasi seputar capaian dan hambatan pelaksanaan rencana kerja sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember Tahun 2022 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1.2 Tugas

Kementerian Agama Kabupaten Jember mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama di wilayah Kabupaten Jember berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama no. 13 Tahun 2012, masing-masing Sub Bag Tata Usaha, Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Seksi Pendidikan Agama Islam, Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Seksi Pendidikan dan Madrasah, Penyelenggara Syariah, Penyelenggara Bimas Kristen dan Katholik serta Kelompok Pejabat Fungsional pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1. Sub Bagian Tata Usaha**, mempunyai tugas melakukan pelayanan urusan persuratan, perencanaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, barang milik negara, kerumahtanggaan, kearsipan, data dan dokumentasi. Dalam menjalankan tugasnya, Sub Bag. Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kab. Jember dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang mencakup wilayah koordinasi antara tiga kelompok urusan (Umum, Kepegawaian, Keuangan), hingga koordinasi fungsi pemangku jabatan fungsional yang ada (Analisis Kepegawaian, Perencana, Pranata Humas, Pranata Komputer, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Statistisi). Kepala Sub Bagian Tata Usaha harus mampu menjamin sinergitas kinerja tugas dan fungsi semua komponen yang ada di dalam Sub Bagian Tata Usaha untuk dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Tentunya, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, perlu mendapat dukungan anggaran yang memadai agar dapat mewujudkan Rencana Strategis Kementerian Agama 2020-2024 pada umumnya dan Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kab. Jember 2020-2024 pada khususnya.
- 2. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam**, mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang kepenghuluan, keluarga sakinah, pangan halal, ibadah sosial serta pengembangan kemitraan umat Islam.
- 3. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh**, mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pembinaan di bidang penyuluhan haji dan umroh, bimbingan jemaah dan petugas, dokumen dan perjalanan haji, perbekalan dan akomodasi haji, serta pembinaan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dan pasca haji.

4. **Seksi Pendidikan dan Madrasah**, mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang kurikulum, ketenagaan dan kesiswaan, sarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan serta supervisi dan evaluasi pada roudhotul athfal, madrasah ibtida'iyah, tsanawiyah dan Aliyah
5. **Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD. Pontren)**, mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi.
6. **Seksi Pendidikan Agama Islam**, mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang pendidikan agama Islam pada PAUD, TK, SD/SLB, SMP/SLB, SMA/SMALB/SMK dan pengelolaan sistem informasi pendidikan agama islam serta evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan agama islam.
7. **Penyelenggara Syariah**, mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang penyuluhan zakat dan wakaf, bina lembaga dan pemberdayaan zakat wakaf, serta pembinaan syariah.
8. **Penyelenggara Bimas Kristen**, mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian pelayanan dan bimbingan di bidang keagamaan bagi masyarakat Kristen.
9. **Penyelenggara Bimas Katolik**, mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian pelayanan dan bimbingan di bidang keagamaan bagi masyarakat Katholik.
10. **Kelompok Jabatan Fungsional**, mempunyai tugas dalam jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.3 Fungsi

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di Kabupaten Jember.
- b. Pembinaan, pelayanan dan bimbingan masyarakat islam, pelayanan haji dan umrah, pengembangan zakat dan wakaf, pembinaan syariah, pendidikan agama dan keagamaan, pondok pesantren, pendidikan agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan masjid, serta urusan agama, pendidikan agama, bimbingan masyarakat Kristen, Katolik, Hindu dan Budha sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi keagamaan.
- d. Pembinaan kerukunan umat beragama.
- e. pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, dan pengawasan program;
- f. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama di Kabupaten Jember.

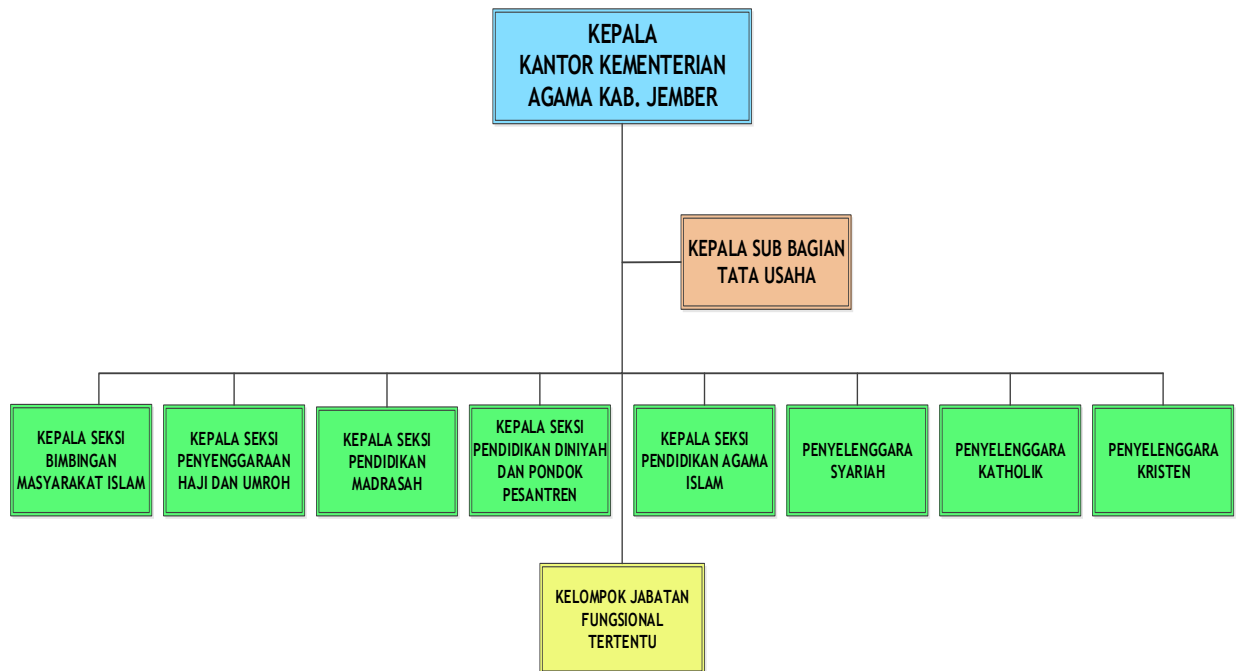
1. 4 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

A. Struktur Organisasi

Guna mengaktualisasikan tugas dan fungsi tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember mempunyai stuktur organisasi sebagai berikut :

- 1). Sub Bagian Tata Usaha;
- 2). Seksi Pendidikan Madrasah;
- 3). Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren;
- 4). Seksi Pendidikan Agama Islam;
- 5). Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
- 6). Seksi Bimbingan Masyarakat Islam;
- 7). Penyelenggara Syariah;
- 8). Penyelenggara Katolik;
- 9). Penyelenggara Kristen dan
- 10). Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember



(PMA no 6 Tahun 2022 atas Perubahan PMA no 19 Tahun 2019)

B. Sumber Daya Manusia

Selanjutnya untuk mewujudkan mekanisme kerja yang harmonis serta hasil kerja yang optimal dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, maka penjabaran tugas dan fungsi dituangkan ke dalam uraian tugas (*job discription*) untuk dipedomani oleh seluruh pegawai yang berjumlah 857 orang yang ada di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Jember. Dalam lingkungan Kantor sendiri yang terdiri dari masing-masing seksi dan penyelenggara adalah sebagai berikut :

Jumlah Pegawai Menurut Masing-Masing Seksi/Penyelenggara :

NO	UNIT KERJA	JML PEGAWAI
1	Sub Bagian Tata Usaha	23
2	Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh	6
3	Seksi Bimas Islam	84
4	Seksi Pendidikan Islam	719
5	Penyelenggara Katolik	2
6	Penyelenggara Kristen	2
7	Bimbingan Masyarakat Hindu	4
8	Bimbingan Masyarakat Budha	1
Jumlah		857



1.5 Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dari Kementerian Agama R.I., Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Secara garis besar, daftar aset (Barang Milik Negara) yang dimiliki oleh Kementerian Agama Kabupaten Jember, antara lain :

C.1. TANAH						
NO	URAIAN	LUAS (M ²)	*) STATUS TANAH			
			SERTIFIKAT	AJB	HGB/P	SEWA
1	TANAH SELURUHNYA	37.157	36.867	290		
2	TANAH UNTUK BANGUNAN	7.483	7.373	110	-	-
3	TANAH KOSONG (TANAH UNTUK SARANA)	8.817	8.637	180	-	-
4	TANAH KOSONG	-	-	-	-	-

C.2. BANGUNAN						
NO	JENIS BANGUNAN	BANYAK - NYA	LUAS BANGUNAN (M ²)	KONDISI BANGUNAN		
				B	RR	RB
1	GEDUNG KANTOR KEMENAG	62	3.045	4	2	
2	GEDUNG KUA	31	4.650	24	7	
3	GEDUNG PENDIDIKAN (MIN)	6	4.078	6		
4	RUMAH DINAS (KEMENAG DAN MIN)	4	292	2	2	

C.3. KENDARAAN BERMOTOR DAN PERALATAN ELEKTRONIK					
NO	URAIAN	BANYAKNYA (UNIT)	KONDISI		
			B	RR	RB
1	KENDARAAN RODA 2	32	19	0	13
2	KENDARAAN RODA 4	3	3	0	0
3	PC / KOMPUTER	131	116	3	12
4	LAPTOP/NOTEBOOK	120	117	2	1
5	PRINTER	146	120	0	26

C.4. MEUBELER DAN ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR					
NO	URAIAN	BANYAKN YA (UNIT)	KONDISI		
			B	RR	RB
1	MEJA KERJA (BESI/METAL DAN KAYU)	2.176	2.060	12	104
2	KURSI (BESI/METAL, KAYU, DAN FIBER)	3.756	1,732	33	446
3	FILING CABINET (BESI)	77	56	7	14
4	LEMARI (BESI/METAL DAN KAYU)	259	189	11	59
5	BRANKAS	14	10	0	4
6	RAK (BESI/METAL DAN KAYU)	72	70	2	0

1.6 Sistematika Penyusunan

Secara garis besar, sistematika penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Agama Kabupaten Jember Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

- Bab I - **Pendahuluan**, menjelaskan latar belakang, tugas fungsi, struktur organisasi, SDM, sarana prasarana dan sistematika penyusunan LKj.
- Bab II - **Perencanaan dan Penetapan Kinerja**, menjelaskan visi dan misi, sasaran strategis, Perencanaan Kinerja, Indikator Kinerja Utama, dan Penetapan Kinerja
- Bab III - **Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan pengukuran kinerja, analisis capaian kinerja, dan Akuntabilitas Keuangan.
- BAB IV - **Penutup**, menjelaskan simpulan dan saran.

Pada bagian akhir laporan ini juga menyertakan seluruh lampiran pendukung LKj.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

2.1. Visi dan Misi

1). Visi

Visi Kementerian Agama adalah Terwujudnya Kementerian Agama yang Profesional dan handal dalam membangun masyarakat yang sholeh, moderat, cerdas, dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong.

2). Misi

Berdasarkan Visi di atas, Kementerian Agama menjabarkan dalam bentuk misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas keshalihan umat beragama
2. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama
3. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah, dan merata.
4. Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu
5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan
6. Memantapkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*)

2.2. Sasaran Strategis

1). Tujuan

Dalam mengemban Misi, Kementerian Agama telah merumuskan beberapa tujuan antara lain:

1. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial
2. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama
3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan
4. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan yang berkualitas
5. Peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif
6. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani, dan komprehensif.

2). Sasaran

Berdasarkan tujuan di atas, sasaran yang ingin dicapai oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember ialah:

- A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama
 1. Meningkatnya kualitas Administrasi Hukum dan KLN;
 2. Meningkatnya kualitas Pembinaan Administrasi Kepegawaian;
 3. Meningkatnya pelayanan Administrasi Keuangan & BMN, dan Operasional Perkantoran
 4. Meningkatnya Kualitas administrasi Organisasi dan Tata Laksana;
 5. Meningkatnya kualitas Perencanaan dan administrasi Organisasi
 6. Meningkatnya Kualitas Infomasi Keagamaan dan Kehumasan
 7. Meningkatnya kualitas Kerukunan Hidup Umat Beragama

B. Program Bimas Islam

1. Pengelolaan KUA dan pembinaan keluarga sakinah
2. Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan wakaf
3. Meningkatnya Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat
4. Meningkatnya Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam
5. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di lingkungan organisasi dan unit kerja di bawahnya

C. Program Pendidikan Islam

1. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Islam
2. Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam
3. Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah
4. Peningkatan kompetensi dan profesionalitas guru serta tenaga kependidikan madrasah
5. Peningkatan Kualitas Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya pada Pendidikan Islam

D. Program Bimas Kristen

1. Peningkatan pengelolaan dan pembinaan Agama Kristen
2. Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen
3. Penyelenggaraan dan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen

E. Program Bimas Katolik

1. Peningkatan Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik
2. Peningkatan Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama

Katolik

3. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik
4. Peningkatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik

F. Program Bimas Hindu

1. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu

G. Program Bimas Budha

1. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Budha

H. Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah

1. Peningkatan kualitas Pelayanan Haji Dalam Negeri
2. Peningkatan Kualitas Pembinaan Penyelenggaraan Ibadah Haji
3. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah

2.3. Perencanaan Kinerja

Pada Tahun 2022, Kantor Kementerian Agama Kab. Jember merumuskan Rencana Kinerja sebagai berikut:

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Penanggung Jawab	Satuan	Target
					2022
1	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama	1. Nilai kinerja penyuluh agama	Seksi Seksi Bimas Islam, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	Nilai	88
		2. Persentase penyuluh agama yang dibina		%	86
		3. Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi		Orang	11
		4. Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan		Kelompok	195

Laporan Kinerja Kementerian (LKj) Tahun Anggaran 2022

2	Menguatnya peran lembaga organisasi sosial keagamaan, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa	Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan	Subbagian Tata Usaha (FKUB)	Kegiatan	2
3	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP	Subbagian Tata Usaha (FKUB)	%	100,00
4	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama	1. Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama	Subbagian Tata Usaha (FKUB)	%	62,16
		2. Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan		Lokasi	1
5	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat	Seksi Bimas Islam, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	%	66,61
6	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	1. Persentase rumah ibadah yang ramah	Seksi Bimas Islam, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	%	35,38
		2. Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina		%	22
		3. Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya		Orang	1
7	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	Seksi Seksi Bimas Islam, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	Kegiatan	5
8	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama	1. Persentase siswa di sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi Pendidikan Agama Islam	%	92,5
		2. Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama		%	57,5
		3. Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama		%	68,75

Laporan Kinerja Kementerian (LKj) Tahun Anggaran 2022

		4. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama		%	62,00
		5. Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama		%	52,50
		6. Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama		%	43,20
		7. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama		Kegiatan	1,00
9	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam	1. Persentase pesantren yang berwawasan moderat	Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren	%	87,00
		2. Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan Al Qur'an		%	3,50
10	Menguatnya dialog lintas agama dan budaya	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	Subbagian Tata Usaha (FKUB)	Kegiatan	1
11	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)	Seksi Bimas Islam	Unit	1
12	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (Pesparawi MTQ, STQ, Ustawa, dan sebagainya)	Seksi Bimas Islam	Kegiatan	1
13	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	1. Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan	Seksi Bimas Islam, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	Unit	77
		2. Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi		%	16
		3. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan		Kegiatan	16

Laporan Kinerja Kementerian (LKj) Tahun Anggaran 2022

		4. Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat		Lokasi	13
		5. Jumlah SDM Ahli Falakiyah yang dibina		Orang	2
14	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk	1. Jumlah KUA yang direvitalisasi/ditingkatkan mutunya	Seksi Bimas Islam	Lokasi	3
		2. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana		Lokasi	5
		3. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah		Orang	1.500
		4. Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah		Orang	500
		5. Jumlah penghulu yang dibina		Orang	40
15	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus	1. Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi	Bidang PHU	%	90,10
16	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	1. Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan	Bidang PHU	%	30,90
		2. Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan		%	0,35
17	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji di asrama haji	2. Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu	Bidang PHU	%	88,05
18	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	1. Persentase petugas haji yang profesional	Bidang PHU	%	88,90
		2. Persentase Jamaah Haji yang mengikuti manasik haji		%	90,10
19	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu	Persentase keberlanjutan layanan (<i>Continuity service</i>)	Bidang PHU	%	88,35

Laporan Kinerja Kementerian (LKj) Tahun Anggaran 2022

20	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat	1. Persentase amil yang memiliki sertifikat kompetensi	Bidang Penyelenggara Zakat Wakaf	%	40,00
		2. Persentase lembaga zakat yang dibina		%	100,00
21	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf	1. Persentase lembaga wakaf yang dibina	Bidang Penyelenggara Zakat Wakaf	%	61,73
		2. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan		%	87,59
		3. Persentase tanah wakaf yang bersertifikat		%	12,19
22	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	1. Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi Pendidikan Agama Islam	%	39,67
		2. Jumlah madrasah/sekolah keagamaan yang melaksanakan program keagamaan		Lembaga	1
		3. Jumlah madrasah/sekolah keagamaan yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan		Lembaga	3
23	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	1. Persentase guru di madrasah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi Pendidikan Agama Islam	%	100,00
		2. Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan		%	19,76
		3. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/sekolah keagamaan		Orang	5
		4. Persentase siswa madrasah yang mengikuti asesmen kompetensi		%	4,70
		5. Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti asesmen kompetensi		%	83,33
24	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem	1. Persentase madrasah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi Pendidikan	%	85,00

Laporan Kinerja Kementerian (LKj) Tahun Anggaran 2022

	pembelajaran	2. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	Agama Islam	%	26,33
		3. Persentase mata pelajaran di madrasah yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran		%	85,00
		4. Persentase mata pelajaran di sekolah keagamaan yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran		%	38,33
25	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	1. Persentase RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana	Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Pendidikan, Agama Islam	%	64,66
		3. Persentase MTs/Wustha/ SMPTK/Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana		%	49,08
		5. Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/sekolah keagamaan		%	70,3
		5. Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana		%	28,00
		6. Persentase Madrasah/Sekolah Keagamaan di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya		%	42,00
26	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	1. Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah	Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Seksi Pendidikan Agama Islam	Jumlah	101.521
		2. Jumlah siswa sekolah keagamaan penerima BOS		Jumlah	3.155
		3. Persentase siswa sekolah keagamaan penerima PIP		%	21,59
		4. Persentase Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional.		%	7,00

Laporan Kinerja Kementerian (LKj) Tahun Anggaran 2022

27	Meningkatnya kualitas penanganan ATS	1. Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi	Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren	%	0,15
		2. Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren		%	28,00
28	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah	Jumlah siswa RA/Taman Seminari/ Pratama Widya Pasraman/ Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP	Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi Bimas Islam, Penyelenggara Katolik, Penyelenggara Kristen	Orang	35
29	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1. Persentase guru madrasah dan ustadz pendidikan diniyah/muadalah yang lulus sertifikasi	Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren	%	72,25
		2. Persentase tenaga kependidikan madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi		%	20,88
		3. Persentase kepala madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi		%	9,93
		4. Persentase ustadz pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG		%	14,00
30	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	1. Persentase guru sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi Pendidikan Agama Islam, Penyelenggara Kristen	%	78,33
		2. Persentase tenaga kependidikan lainnya di sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal		%	76,66
		3. Persentase guru pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal		%	20,00
31	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	1. Persentase Guru Seksi Pendidikan Agama Islam, Ustadz Pendidikan Diniyah/Muadalah, Guru Madrasah, Guru Sekolah Keagamaan yang mengikuti PPG	Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Seksi Pendidikan	%	2,00

Laporan Kinerja Kementerian (LKj) Tahun Anggaran 2022

		2. Persentase Guru Seksi Pendidikan Agama Islam, Ustadz Pendidikan Diniyah/Muadalah berkualifikasi minimal S1	Agama Islam	%	81,00
32	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi	1. Jumlah sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi berdasarkan hasil pemetaan	Seksi Pendidikan Madrasah, PAIS, Penyelenggara Kristen	Lembaga	31,00
33	Meningkatnya budaya mutu pendidikan	1. Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu	Seksi Pendidikan Madrasah, PAIS, Penyelenggara Kristen	%	80,00
		2. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu		%	60,45
		3. Persentase siswa madrasah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional		%	4,70
		4. Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional		%	7,6
34	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	1. Persentase madrasah yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	Seksi Pendidikan Madrasah, Pontren, Penyelenggara Kristen	%	80,00
		2. Persentase sekolah keagamaan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran		%	63,98
		3. Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman;		%	40,00
		4. Persentase madrasah yang ramah anak.		%	60,00
		5. Persentase sekolah keagamaan yang ramah anak.		%	71,66
35	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan	1. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi Pendidikan Agama Islam, Penyelenggara Kristen	Madrasah	24
		2. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada sekolah keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan		Sekolah	4

Laporan Kinerja Kementerian (LKj) Tahun Anggaran 2022

		3. Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina		Unit	26
36	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	3. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	Subbagian Tata Usaha (Kepegawaian)	Kegiatan	1,00
37	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	1. Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja	Subbagian Tata Usaha (Kepegawaian)	%	100,00
		2. Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditandaklanjuti		%	100,00
		3. Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan		%	85,00
		4. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)		%	90,00
		5. Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya		%	90,00
		6. Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu		%	100,00
		7. Persentase data ASN yang diupdate		%	90,00
		8. Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses		%	100,00
38	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan	1. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	Subbagian Tata Usaha (Keuangan)	Dokumen	16
		2. Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)		%	100,00
		3. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal		%	100,00
		4. Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama		%	100,00

Laporan Kinerja Kementerian (LKj) Tahun Anggaran 2022

39	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel	1. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	Subbagian Tata Usaha (BMN)	%	100
		2. Persentase tanah yang bersertifikat		%	100
		3. Persentase nilai Opname Physic (OP) BMN		%	100
40	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi	1. Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis	Subbagian Tata Usaha (Ortala)	%	70,00
		2. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi		%	70,00
		3. Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti		%	100,00
41	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	1. Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi	Subbagian Tata Usaha (Ortala)	%	80,00
		2. Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas		Satker	14,00
		3. Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja		Orang	10,00
42	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	1. Persentase output perencanaan yang berbasis data	Subbagian Tata Usaha (Perencanaan dan Humas)	%	100,00
		2. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra		%	70,00
		3. Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti		%	90,00
43	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran	1. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas	Subbagian Tata Usaha (Perencanaan)	%	90,00
		2. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti		%	70,00

Laporan Kinerja Kementerian (LKj) Tahun Anggaran 2022

44	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	Subbagian Tata Usaha (Pengadaan Barang dan Jasa)	%	70,00
45	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	1. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	Subbagian Tata Usaha (Umum, Pengadaan Barang dan Jasa)	%	90,00
		2. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik		%	70,00
		3. Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen		%	5,00
46	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga	1. Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan	Subbagian Tata Usaha (Kehumasan)	%	85,00
47	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi	1. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi	Subbagian Tata Usaha (Kehumasan)	Kegiatan	85
		2. Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter		%	95,00
48	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	1. Jumlah Sistem Informasi yang memenuhi standar	Subbagian Tata Usaha (Humas, Data, dan Informasi)	Unit	25,00
		2. Jumlah satuan kerja yang terhubung dalam satu jaringan dan internet		Satker	25,00
		3. Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable		%	85,00
49	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan	1. Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	Subbagian Tata Usaha (Keuangan)	Orang	442
		2. Jumlah dokumen penyusunan rencana program dan anggaran, keuangan, kepegawaian	Subbagian Tata Usaha (Perencanaan)	Dokumen	8
		3. Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang disediakan	Subbagian Tata Usaha (BMN)	Unit	71.598

		4. Jumlah layanan umum dan perlengkapan	Subbagian Tata Usaha (Umum)	Unit	34.305
--	--	---	-----------------------------	------	--------

2.4. Penetapan Kinerja

Penetapan Kinerja diwujudkan melalui Kontrak Kerja yang telah ditandatangani oleh masing-masing pengelola DIPA (Kepala Seksi) dan penanggungjawab umum Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Jember, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Di dalam kontrak kerja dimaksud, dijelaskan bahwa Kepala Seksi sebagai Pihak pertama pada Tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua yang dalam hal ini Kepala kantor Kementerian Agama Kab. jember akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Selain itu, dalam laporan ini disertakan pula kontrak kerja antara Kepala Kementerian Agama Kab. Jember, selaku kepanjangan tangan dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Agama di wilayah Jawa Timur, dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Dalam hal ini, Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Timur akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Adapun dokumen kontrak kerja tersebut dapat dilihat pada lampiran dalam laporan ini.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran kinerja

Pengukuran kinerja pada Rencana Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember Tahun 2021 adalah membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai.

1. Pada sasaran meningkatnya Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN telah ditetapkan indikator kinerja antara lain;
 - Dokumen Peraturan Perundang-Undangan dengan target pembinaan manajemen PNS dengan target 1 dokumen.
2. Pada sasaran meningkatnya Pembinaan Administrasi Kepegawaian telah ditetapkan indikator kinerja antara lain;
 - Pemahaman akan Permen PAN&RB No 6 Tahun 2022 bagi PNS dengan target 1 kegiatan
 - Pengetahuan akan pengusulan kenaikan pangkat bagi JFT dengan target 1 kegiatan
 - Pembinaan kepegawaian dalam rangka Pemutakhiran data SIMPEG dengan target 1 kegiatan
3. Pada sasaran meningkatnya pengembangan SDM pegawai telah ditetapkan indikator kinerja antara lain;
 - Adany monitoring dan evaluasi ke tiap unit kerja di bawah kemenag dengan target kontinyu setiap bulan dalam 1 tahun
4. Pada sasaran meningkatnya Pembinaan Administrasi Organisasi Tata Laksana telah ditetapkan indikator kinerja antara lain;
 - Tersampainya laporan hasil Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal dan BPK RI dalam lingkungan kemenag.
 - Terlaksananya pelaporan Laporan Triwulan pada tahun 2022 melalui aplikasi SIPKA.

5. Pada sasaran tercapainya penyusunan program kegiatan dan anggaran yang baik dan benarserta sesuai dengan kebutuhan instansi/lembaga, telah ditetapkan indikator kinerja antara lain;
 - Pembinaan Administrasi Pengelolaan Data Perencanaan dengan target 3 kegiatan.
 - Koordinasi dengan seluruh satker dan instansi vertikal kementerian agama, dan juga kementerian keuangan melalui kanwil DJPB dengan target kegiatan sepanjang tahun
 - Meningkatkan kompetensi SDM jabfung perencana dengan target 1 kegiatan.
6. Pada sasaran meningkatnya Pembinaan Administrasi Umum telah ditetapkan indikator kinerja antara lain;
 - Pembinaan Administrasi Umum (TU dan Perlengkapan), Rakor antar/inter instansi, dan penyelenggaraan perpustakaan/kerasipan dengan target masing-masing 1 kegiatan dalam jangka waktu 1 tahun.
 - Rehabilitasi gedung kantor kemenag senilai Rp 69.790.000,00
 - Pengelolaan pengadaan dengan pendampingan rencana pengadaan pada semua DIPA satker kemenag.
 - Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran dengan target selama 1 tahun yang meliputi :
 - o Belanja Kebutuhan Sehari-Hari Kantor dengan target selama 1 tahun
 - o Belanja Jasa Kebersihan, Satpam, dan Sopir Kantor dengan target 12 bulan.
 - o Belanja Sambungan Internet dengan target 12 bulan.
 - o Belanja Langganan Biaya Pos dengan target 12 bulan.
 - o Belanja Pakaian Petugas Keamanan/Satpam, Sopir, Petugas Kebersihan Kantor dengan target 2 orang.
 - o Belanja Langganan Rekening Listrik dengan target 12 bulan.
 - o Belanja Langganan Rekening Air dengan target 12 bulan.
 - o Belanja Langganan Rekening Telepon dengan target 12 bulan.

- Biaya Perawatan Gedung dengan target 1 paket biaya perawatan.
 - Biaya Perawatan/Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4 dengan target 2 unit.
 - Biaya Perawatan/Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2 dengan target 22 unit.
7. Pada sasaran pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN, telah ditetapkan indikator kinerja kegiatan antara lain :
- Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan dengan target 2 kegiatan
 - Pengelolaan laporan perbendaharaan dengan target 1 kegiatan
 - Pembinaan pengelolaan BMN dan Persediaan sebanyak 1 kegiatan
 - Monitoring BMN dengan target sepanjang tahun
8. Pada sasaran meningkatnya Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan telah ditetapkan indikator kinerja antara lain;
- Terpenuhinya Layanan Humas dan Publik dalam jangka waktu 1 tahun.
9. Pengelolaan KUA dan pembinaan keluarga Sakinah terdiri dari beberapa output:
- Penghulu yang terbina sebanyak 37 orang
 - KUA yang memenuhi standar pelayanan minimal sebanyak 4 KUA Revitalisasi
 - Bimbingan perkawinan pra nikah sebanyak 1.980 orang
10. Pada sasaran meningkatnya Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf telah ditetapkan indikator kinerja antara lain;
- Terselenggaranya kegiatan legalitas tanah wakaf melalui bantuan sertifikasi tanah wakaf
11. Pada sasaran meningkatnya Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat telah ditetapkan indikator kinerja antara lain;
- Diberikannya bantuan operasional BAZNAS kab/kota.

- Meningkatnya Lembaga zakat yang terakreditasi dalam bentuk pengawasan zakat (Syariah)
12. Pada sasaran meningkatnya Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam telah ditetapkan indikator kinerja antara lain;
- Tersedianya data dan informasi penerangan Agama Islam.
 - Tersedianya Tunjangan Penyuluh Agama Islam Non PNS dengan target 248 orang
 - Terselenggaranya pembinaan penyuluh Agama Islam melalui konten dakwah media sosial.
 - Pendataan dan verifikasi lembaga seni dan siaran Agama Islam
 - Launching kampung moderasi beragama binaan Penyuluh Agama Islam
13. Pada sasaran meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam telah ditetapkan indikator kinerja antara lain;
- Gaji dan Tunjangan yang melekat Terbayar dengan target 14 bulan.
 - Tunjangan Kinerja terbayar dengan target 12 bulan.
 - Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran dengan target 12 bulan.
14. Peningkatan mutu dan relevansi agama Islam telah ditetapkan indikator kinerja antara lain:
- terselesaikannya pembayaran tunjangan profesi guru PAI non PNS sebanyak 302 orang terdiri dari jenjang TK 2 orang, SD 140 orang, SMP 113 orang, SMA 16 orang, dan SMK 31 orang.
 - Terbayarnya tunjangan profesi guru PAI PNS sebanyak 248 terdiri dari pengawas PAI 17 orang, SD 165 orang, SMP 46 orang, SMA 10 orang, SMK 10 orang.
15. Peningkatan akses mutu relevansi dan daya saing Pendidikan Agama Islam dengan indikator kinerja sebagai berikut:

- Guru/ustad Pendidikan Agama Islam penerima tunjangan insentif sebanyak 199 orang terdiri dari TPQ 49 orang, Pondok Pesantren 67 orang, Madrasah Diniyah 83 org.
 - Santri Pendidikan Diniyah formal/Muadhalah/PPS tingkat Wustha penerima BOS sebanyak 1.408 santri.
 - Santri Pendidikan Diniyah formal/Muadhalah/PPS tingkat Ulyah penerima BOS sebanyak 1.137 santri.
 - Penerima Bantuan Operasional Pendidikan total sebanyak 56 lembaga terdiri dari 22 lembaga Madrasah Diniyah Tza'miliyah , Lembaga Pendidikan Al-Qur'an sebanyak 9 lembaga, Pondok Pesantren sebanyak 14 lembaga, PKKPS (pendidikan kesetaraan pondok pesantren salafiyah) 5 lembaga , Satuan pendidikan muadalah 3 lembaga, mahad ali 3 lembaga.
 - Santri Pendidikan Diniyah formal/Muadhalah/PPS tingkat Wustha penerima bantuan PIP sebanyak 49 santri
 - Santri Pendidikan Diniyah formal/Muadhalah/PPS tingkat Ulyah penerima bantuan PIP sebanyak 48 santri
16. Peningkatan akses dan mutu relevansi madrasah telah ditetapkan indikator kinerja sebagai berikut:
- Siswa MI Penerima BOS sebanyak 57.378 siswa
 - Siswa MTS Penerima BOS sebanyak 35.570 siswa
 - Siswa MA Penerima BOS sebanyak 19.364 siswa
 - Bantuan operasional Pendidikan untuk RA sebanyak 15.105 siswa
 - Layanan dukungan manajemen satuan kerja sebanyak 1 layanan
17. Peningkatan kompetensi dan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan pekerja dengan indikator kinerja sebagai berikut:
- Guru non PNS penerima tunjangan insentif
 - Guru non PNS penerima tunjangan profesi
 - Terlaksananya layanan perkantoran berupa pembayaran tunjangan profesi guru non PNS selama 1 Tahun.

18. Dukungan manajemen Pendidikan dan pelayanan tugas teknis lainnya Pendidikan Islam dengan indikator kinerja sebagai berikut:
- Layanan dukungan manajemen eselon I program Pendidikan Islam pada kantor kementerian Agama kabupaten sebanyak 1 layanan
 - Terpenuhinya layanan perkantoran selama 1 tahun berupa pembayaran gaji dan tunjangan serta terlaksananya kegiatan operasional perkantoran
19. Pengelolaan dan pembinaan Agama Kristen berupa pemberian tunjangan profesi guru Non PNS sebanyak 1 orang.
20. Pengelolaan dan pembinaan Agama Kristen dengan indikator kinerja berupa kegiatan pembinaan penyuluh Agama Kristen non PNS sebanyak 2 orang.
21. Penyelenggaraan administrasi perkantoran Bimas Kristen dengan indikator kinerja terlaksananya layanan perkantoran selama 1 tahun berupa pembayaran gaji dan tunjangan serta terlaksananya kegiatan operasional perkantoran.
22. Pengelolaan dan pembinaan agama Katolik dengan indikator kinerja antara lain:
- Guru Non PNS penerima tunjangan profesi sebanyak 3 orang.
 - Meningkatnya kompetensi guru Pendidikan Agama Katolik melalui kegiatan pembinaan moderasi beragama sebanyak 30 orang
 - Tersedianya sarana dan prasarana pendukung operasional Agama Katolik
 - KKG/MGMP Katolik yang menerima bantuan untuk peningkatan kompetensi sebanyak 1 lembaga
23. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik telah ditetapkan indikator kerjanya sebagai berikut:
- Keluarga Katolik yang memperoleh bimbingan keluarga Bahagia sebanyak 30 orang

- Penyuluh agama Katolik Non PNS penerima tunjangan penyuluh sebanyak 8 orang
 - Lembaga keagamaan Katolik yang difasilitasi sebanyak 4 lembaga
24. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya Bimas Katolik dengan indikator kinerja terlaksananya layanan perkantoran selama 1 tahun berupa pembayaran gaji dan tunjangan serta terlaksananya kegiatan operasional perkantoran.
25. Penyelenggaraan administrasi perkantoran Bimas Katolik Pendidikan Bimas Katolik dengan indikator kinerja berupa terlaksananya layanan perkantoran pada pembayaran tunjangan profesi guru PNS
26. Penyelenggaraan administrasi perkantoran Bimas Hindu dan Budha berkisar pada pelayanan pembayaran gaji dan tunjangan serta pelaksanaan operasional perkantoran selama 12 bulan.
27. Peningkatan pelayanan Haji dalam negeri telah ditetapkan indikator kinerja berupa pelayanan dokumen dan perlengkapan Jemaah haji yang dilaksanakan dalam sosialisasi orientasi penyelesaian dokumen dan perlengkapan haji.
28. Terlaksananya pembinaan haji dengan indikator kinerja antara lain:
- seleksi petugas haji tingkat kab/kota untuk mewujudkan petugas haji yang professional.
 - Bimbingan Jemaah haji melalui bimbingan manasik dan perjalanan haji.
29. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas Teknik lainnya penyelenggaraan haji dan umroh dengan indikator kinerja sebagai berikut:
- Layanan dukungan manajemen eselon I berupa pemeliharaan aplikasi perangkat Siskohat
 - Terlaksananya layanan perkantoran berupa pembayaran gaji dan tunjangan serta pelaksanaan operasional perkantoran

3.2. Analisis kinerja

Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan evaluasi kinerja yang diolah dari formulir Penetapan Kinerja dan Pengukuran Kinerja, diperoleh kesimpulan sementara bahwa pada Tahun 2022 semua program dan kegiatan telah memberikan kontribusi kepada visi dan misi Kementerian Agama Kabupaten Jember. Namun mengingat anggaran yang sangat terbatas dan kurangnya sumberdaya manusia, maka kinerja Kementerian Agama Kabupaten Jember Tahun 2022 belumlah dapat dikatakan sebagai kinerja yang optimal.

Untuk meminimalisasi hambatan tersebut dan agar kejadian serupa tidak terulang dimasa yang akan datang, perlu dicari langkah pemecatan masalah secara cepat, tepat dan selamat, sehingga digunakan dasar pengambilan kebijakan dimasa mendatang.

Adapun langkah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Memberdayakan sumber daya yang dimiliki baik anggaran, SDM, dan sarana secara efektif dan efisien.
2. Memantapkan koordinasi antar Instansi terkait.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas diklat.
4. Sosialisasi perturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Mengusulkan penambahan pegawai yang sesuai dan tepat sasaran.

Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misinya menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan dana kepada kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat. Selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja terus menerus dilakukan. Dengan adanya

peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana, dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Kementerian Agama Kabupaten Jember dapat meningkat.

Berdasarkan analisis Kinerja yang diolah dari formulir Pengukuran Kinerja dan Penetapan Kinerja diperoleh kesimpulan bahwa pada Tahun 2022 semua program dan kegiatan telah memberikan kontribusi pada ketercapaian visi dan misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember. Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi, menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu, mengalokasikan dana pada kegiatan berdasarkan skala prioritas.

3.3. Akuntabilitas keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan penyajian suatu laporan keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran dalam kurun waktu satu tahun, tahun anggaran 2022, yang meliputi Kegiatan:

- Administrasi Umum (Kesekretariatan)
- Seksi Bimbingan Masyarakat Agama Islam
- Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh
- Seksi Pendidikan dan Madrasah (PENDMA)
- Seksi Pendidikan Agama Islam (PAIS)
- Seksi Pendidikan Diniyah dan Pontren
- Penyelenggara Syariah
- Bimbingan Masyarakat Kristen
- Bimbingan Masyarakat Katholik
- Bimbingan Masyarakat Hindu dan
- Bimbingan Masyarakat Budha

Alokasi anggaran DIPA tersebut diperuntukkan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan dan termasuk belanja perjalanan dinas untuk pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember ditunjang dengan anggaran yang berasal dari:

1. DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember Tahun 2022.
2. PNBPNR Tahun 2022.
3. Bantuan Operasional dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur.
4. Dana Basis dan Swadaya

Dari total dana yang berasal dari DIPA kantor Kementerian Agama Jember tahun anggaran 2022 telah terserap di masing masing Sekjend dan Dirjen Kementerian Agama Kabupaten jember sebesar :

1. Sekjend (Subbag TU) :

- Dari Total Anggaran 3.786.563.000,00 ter-realisis sebesar 3.754.958.255 (99.17%). Angka prosentase realisasi anggaran sebesar 99.17% tersebut termasuk baik .
- Belanja pegawai (akun 51) anggaran awal 3.059.045.000 terealisasi 3.039.568.937 (99.36%)
- Belanja barang (akun 52) anggaran awal 693.518.000 realisasi 681.494.318 (98.27%) baik
- Belanja Modal (akun 53) anggaran awal 34.000.000 terealisasi 33.895.000 (99.69%)

2. Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam

- Dari pagu anggaran sebesar 21.109.516.000,- ter-realisis sebesar 20.514.780.177,- (97.18%). Dapat dikatakan bahwa penyerapan anggaran sebesar 97.18% ini cukup optimal dan baik.
- Belanja pegawai (akun 51) anggaran awal 14.766.856.000,- ter-realisis sebesar 14.222.855.398 (96.32%)
- Belanja barang (akun 52) anggaran awal 5.863.160.000,- ter-realisis sebesar 5.812.985.679 (99,14%)
- Belanja Modal (akun 53) anggaran awal 479.500.000 terealisasi 478.939.100 (99.88%)

3. Ditjen Pendidikan Islam

- Pagu Anggaran untuk Ditjen Pendis adalah yang terbesar dibanding dengan satker lain di kemenag jember. Total pagu dana yang ada

sebesar 55.409.524.000 ,- ter-realisis sebesar 54.767.688.865 (98.84%).

- Belanja Pegawai (akun 51) anggaran awal 52.547.224.000,- ter-realisis sebesar 51.914.191.239,- (99.80%)
- Belanja barang (akun 52) anggaran awal 2.661.300.000,- ter-realisis sebesar 2.653.074.626 (99.69%)
- Belanja modal (akun 53) anggaran awal 201.000.000,- ter-realisis 200.423.000,- (99.71%)

4. Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen

- Total realisasi anggaran bimas Kristen adalah 396.758.742,- dari pagu anggaran sebesar 423.636.000,- (93.66%).
- Belanja pegawai (akun 51) anggaran awal 393.036.000,- ter-realisis sebesar 368.555.742- (93.77%)
- Belanja barang (akun 52) anggaran awal 30.600.000- dan ter-realisis sebesar 28.203.000,- (92.17%)

5. Ditjen Bimbingan Masyarakat Katolik

- Pagu anggaran bimas katolik adalah sebesar 675.861.000,- dan realisasinya adalah sebesar 591.317.196,- (87.49%).
- Belanja pegawai (akun 51) anggaran awal 503.361.000,- ter-realisis sebesar 430.867.696,- (85.60%)
- Belanja barang (akun 52) anggaran awal 117.500.000,- ter-realisis sebesar 105.819.500,- (90.06%)
- Belanja modal (akun 53) anggaran awal 55.000.000- ter-realisis 54.630.000,- (99.33%)

6. Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu

- Pagu anggaran Bimas Hindu sebesar 371.734.000,- dan ter realisasi sebesar 317.286.591,- (85.35%)
- Belanja pegawai (akun 51) anggaran awal 357.234.000,- dan ter-realisis sebesar 302.786.591,- (84.76%)
- Belanja barang (akun 52) anggaran awal 14.500.000,- dan ter-realisis sebesar 14.500.000,- (100%)

7. Ditjen Bimbingan Masyarakat Budha

- Pagu anggaran Bimas Budha adalah sebesar 156.405.000,- dan terrealisasi sebesar 151.620.960,- (96.94%).
- Belanja pegawai (akun 51) anggaran awal 137.685.000,- dan terrealisasi sebesar 136.720.960,- (99,30%)
- Belanja barang (akun 52) anggaran awal 18.720.000,- dan terrealisasi sebesar 14.900.000,- (79.59%)

8. Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah

- Pagu Penyelenggara Haji dan Umrah adalah sebesar 905.403.000,- dan terrealisasi sebesar 878.049.578,- (96.98%).
- Belanja pegawai (akun 51) anggaran awal 669.904.000,- dan terrealisasi sebesar 656.969.856,- (98.07%)
- Belanja barang (akun 52) anggaran awal 235.499.000,- dan terrealisasi sebesar 221.079.722,- (93.88%)

Dana-dana tersebut digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana tercantum dalam rencana kinerja. Terdapat selisih dana minus dalam pelaksanaan. Namun hal tersebut sudah diatasi dengan penyempurnaan dan revisi DIPA. Sehingga Pagu Minus yang ada pada DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember pada tahun anggaran 2022 sudah dapat diatasi.

Selanjutnya, jika dibandingkan antara harapan dengan kenyataan di lapangan pada prinsipnya anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan kedinasan Kementerian Agama Kab. Jember tersebut masih lebih baik dari tahun sebelumnya.

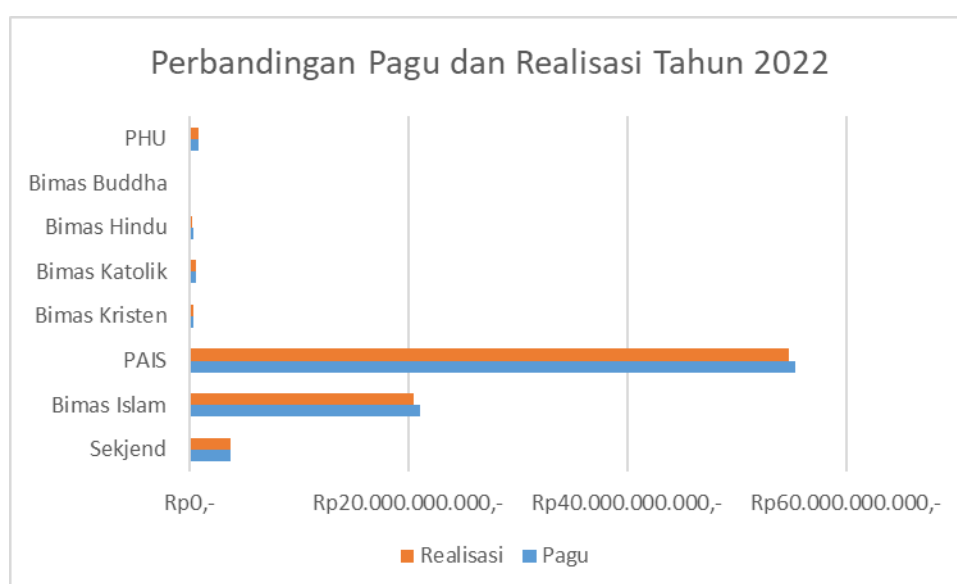
Distribusi pagu anggaran dan realisasi penyerapannya pada tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Sekretariat Jenderal		Bimas Islam		Pendidikan Agama Islam	
Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
3.786.563.000	3.754.958.255	21.109.516.000	20.514.780.177	55.409.524.000	54.767.688.865
	99.17%		97.18%		98.84%

Laporan Kinerja Kementerian (LKj) Tahun Anggaran 2022

Bimas Kristen		Bimas Katolik		Bimas Hindu	
Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
423.636.000	396.758.742	675.861.000	591.317.196	371.734.000	317.286.591
	93.66%		87.49%		85.35%
Bimas Budha		Penyelenggaraan Haji dan Umroh			
Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
156.405.000	151.620.960	905.403.000	878.049.578		
	96.94%		96.98%		

Secara Grafik, dapat dilihat pada grafik di bawah ini antara pagu dan realisasi anggaran di Kementerian Agama Kabupaten Jember.



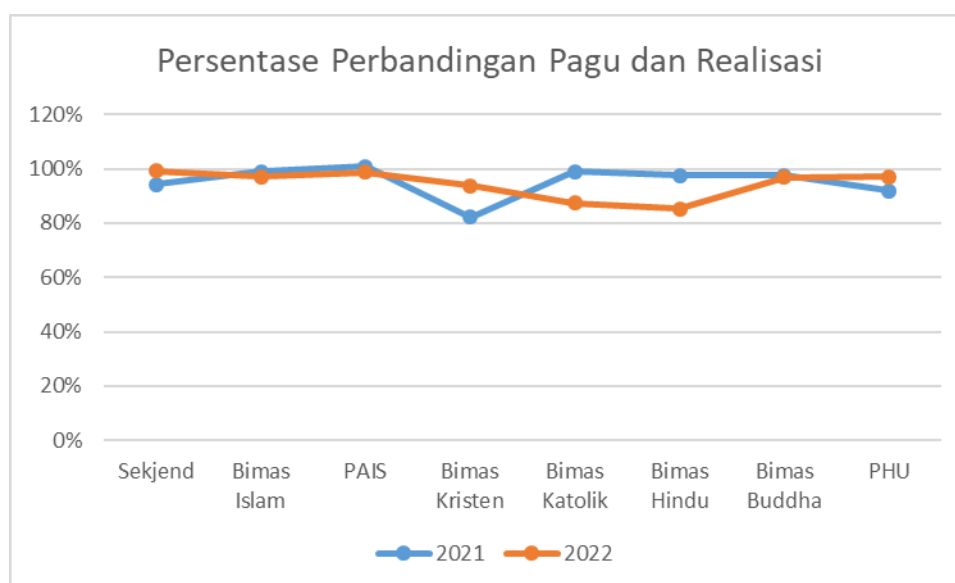
Secara Keseluruhan, total pagu dan realisasi dari dana yang diterima Kementerian Agama Kab. Jember adalah sebagai berikut :

Pagu	Realisasi	Prosentase %
82.838.642.000	81.372.460.364	98.23%

Perbandingan pagu anggaran dan realisasi Kementerian Agama Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Program Kerja	Realisasi	
	Tahun 2021	Tahun 2022
Sekretariat Jenderal	94,30%	99,17%
Bimas Islam	98,90%	97,18%

Pendidikan Islam	100,93%	98,84%
Bimas Kristen	82,09%	93,66%
Bimas Katolik	99,06%	87,49%
Bimas Hindu	97,46%	85,35%
Bimas Budha	97,50%	96,94%
Penyelenggara Haji dan Umroh	91,92%	96,98%
Jumlah Keseluruhan Realisasasi Anggaran	99,75%	98,23%



Dari tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa jumlah keseluruhan realisasi anggaran tahun 2022 mengalami peningkatan nilai dibanding pada tahun 2021. Terkait dengan prosentase anggaran tahun 2022 sebesar 98.23%.

Untuk kedepannya, diharapkan dalam penyusunan anggaran dapat diperhitungkan secara rinci dan seksama agar dapat dievaluasi penyebab kurang maksimalnya dana yang belum terserap. Hal tersebut memerlukan dukungan dari semua pihak terkait, terutama Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, selaku yang menaungi keberadaan kantor Kementerian Agama Kab./Kota di Jawa Timur, tidak terkecuali bagi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember yang berdomisili di wilayah hukum Provinsi Jawa Timur.

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Kementerian (LKj) pada Kementerian Agama Kabupaten Jember Tahun 2022 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai target kinerja Kementerian Agama Kabupaten Jember Tahun 2022 dan perkembangan tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian program kerja.

Capaian program kerja Kementerian Agama Kabupaten Jember secara umum sudah mencapai target, dengan capaian realisasi sebesar 98,23% dari target. Hasil yang telah dicapai merupakan hasil bersama seluruh komponen dalam satuan organisasi yang telah memberi dukungan dan peran aktif demi terlaksananya seluruh program kerja maupun kebijakan dalam mewujudkan visi dan misi, meskipun terdapat beberapa target yang belum mencapai apa yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa target program kerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society*.

Demikianlah gambaran tentang Laporan Kinerja Kementerian (LKj) pada Kementerian Agama Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 dengan segala keberhasilan dan kekurangan yang telah dicapai. Besar harapan kami, semoga di tahun mendatang dapat menunjukkan adanya peningkatan yang lebih baik.

Realisasi Pagu Anggaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember Tahun 2022

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Penanggung Jawab	Satuan	Target	Realisasi
					2022	2022
1	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama	1. Nilai kinerja penyuluh agama	Seksi Seksi Bimas Islam, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	Nilai	88	87,5
		2. Persentase penyuluh agama yang dibina		%	86	98.46
		3. Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi		Orang	11	3
		4. Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan		Kelompok	195	267
2	Menguatnya peran lembaga organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa	Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan	Subbagian Tata Usaha (FKUB)	Kegiatan	2	2
3	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP	Subbagian Tata Usaha (FKUB)	%	100,00	100
4	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama	1. Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama	Subbagian Tata Usaha (FKUB)	%	62,16	62,16
		2. Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan		Lokasi	1	1
5	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat	Seksi Bimas Islam, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	%	66,61	100
6	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	1. Persentase rumah ibadah yang ramah	Seksi Bimas Islam, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	%	35,38	100
		2. Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina		%	22	103,5
		3. Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya		Orang	1	1

7	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	Seksi Seksi Bimas Islam, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	Kegiatan	5	48
8	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama	1. Persentase siswa di sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi Pendidikan Agama Islam	%	92,5	100
		2. Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama		%	57,5	100
		3. Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama		%	68,75	100
		4. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama		%	62,00	100
		5. Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama		%	52,50	100
		6. Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama		%	43,20	100
		7. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama		Kegiatan	1,00	1
9	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam	1. Persentase pesantren yang berwawasan moderat	Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren	%	87,00	87,00
		2. Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan Al Qur'an		%	3,50	3,50

10	Menguatnya dialog lintas agama dan budaya	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	Subbagian Tata Usaha (FKUB)	Kegiatan	1	1
11	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)	Seksi Bimas Islam	Unit	1	1
12	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (Pesparawi MTQ, STQ, Ustawa, dan sebagainya)	Seksi Bimas Islam	Kegiatan	1	1
13	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	1. Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan	Seksi Bimas Islam, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik	Unit	77	77
		2. Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi		%	16	16
		3. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan		Kegiatan	16	16
		4. Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat		Lokasi	13	13
		5. Jumlah SDM Ahli Falakiyah yang dibina		Orang	2	2
14	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk	1. Jumlah KUA yang direvitalisasi/ditingkatkan mutunya	Seksi Bimas Islam	Lokasi	3	3
		2. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana		Lokasi	5	5
		3. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah		Orang	1.500	1.980
		4. Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah		Orang	500	100
		5. Jumlah penghulu yang dibina		Orang	40	40

15	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus	1. Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi	Bidang PHU	%	90,10	77.69
16	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	1. Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan	Bidang PHU	%	30,90	50
		2. Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan		%	0,35	0,85
17	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji di asrama haji	1. Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu	Bidang PHU	%	88,05	45,43
18	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	1. Persentase petugas haji yang profesional	Bidang PHU	%	88,90	45,43
		2. Persentase Jemaah Haji yang mengikuti manasik haji		%	90,10	55,49
19	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu	Persentase keberlanjutan layanan (<i>Continuity service</i>)	Bidang PHU	%	88,35	88.35
20	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat	1. Persentase amil yang memiliki sertifikat kompetensi	Bidang Penyelenggara Zakat Wakaf	%	40,00	20
		2. Persentase lembaga zakat yang dibina		%	100,00	100
21	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf	1. Persentase lembaga wakaf yang dibina	Bidang Penyelenggara Zakat Wakaf	%	61,73	30.87
		2. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan		%	87,59	43.80
		3. Persentase tanah wakaf yang bersertifikat		%	12,19	6.10
22	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	1. Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi Pendidikan Agama Islam	%	39,67	N/A

		2. Jumlah madrasah/sekolah keagamaan yang melaksanakan program keagamaan		Lembaga	1	1
		3. Jumlah madrasah/sekolah keagamaan yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan		Lembaga	3	3
23	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	1. Persentase guru di madrasah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi Pendidikan Agama Islam	%	100,00	100
		2. Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan		%	19,76	19,76
		3. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/sekolah keagamaan		Orang	5	5
		4. Persentase siswa madrasah yang mengikuti asesmen kompetensi		%	4,70	99
		5. Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti asesmen kompetensi		%	83,33	83,33
24	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran	1. Persentase madrasah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi Pendidikan Agama Islam	%	85,00	85,00
		2. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran		%	26,33	20
		3. Persentase mata pelajaran di madrasah yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran		%	85,00	20
		4. Persentase mata pelajaran di sekolah keagamaan yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran		%	38,33	25
25	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	1. Persentase RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang	Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi Pendidikan	%	64,66	91.67

		memenuhi SPM sarana prasarana	Diniyah dan Pondok Pesantren, Pendidikan, Agama Islam			
		3. Persentase MTs/Wustha/ SMPTK/Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana		%	49,08	90.39
		5. Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/sekolah keagamaan		%	70,3	
		5. Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana		%	28,00	28,00
		6. Persentase Madrasah/Sekolah Keagamaan di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya		%	42,00	100
26	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	1. Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah	Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Seksi Pendidikan Agama Islam	Jumlah	101.521	261.605
		2. Jumlah siswa sekolah keagamaan penerima BOS		Jumlah	3.155	2.642
		3. Persentase siswa sekolah keagamaan penerima PIP		%	21,59	21.59
		4. Persentase Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional.		%	7,00	7,00
27	Meningkatnya kualitas penanganan ATS	1. Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi	Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren	%	0,15	0,08
		2. Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren		%	28,00	28,00

28	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah	Jumlah siswa RA/Taman Seminari/ Pratama Widya Pasraman/ Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP	Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi Bimas Islam, Penyelenggara Katolik, Penyelenggara Kristen	Orang	35	35
29	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1. Persentase guru madrasah dan ustadz pendidikan diniyah/muadalah yang lulus sertifikasi	Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren	%	72,25	100
		2. Persentase tenaga kependidikan madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi		%	20,88	20,88
		3. Persentase kepala madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi		%	9,93	11,65
		4. Persentase ustad pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG		%	14,00	14,00
30	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	1. Persentase guru sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi Pendidikan Agama Islam, Penyelenggara Kristen	%	78,33	100
		2. Persentase tenaga kependidikan lainnya di sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal		%	76,66	100
		3. Persentase guru pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal		%	20,00	75
31	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	1. Persentase Guru Seksi Pendidikan Agama Islam, Ustadz Pendidikan Diniyah/Muadalah, Guru Madrasah, Guru Sekolah Keagamaan yang mengikuti PPG	Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Seksi Pendidikan Agama Islam	%	2,00	2,00
		2. Persentase Guru Seksi Pendidikan Agama Islam, Ustadz Pendidikan Diniyah/Muadalah berkualifikasi minimal S1		%	81,00	78

32	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi	1. Jumlah sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi berdasarkan hasil pemetaan	Seksi Pendidikan Madrasah, PAIS, Penyelenggara Kristen	Lembaga	31,00	60
033	Meningkatnya budaya mutu pendidikan	1. Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu	Seksi Pendidikan Madrasah, PAIS, Penyelenggara Kristen	%	80,00	80
		2. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu		%	60,45	60,45
		3. Persentase siswa madrasah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional		%	4,70	4,70
		4. Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional		%	7,6	7,6
34	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	1. Persentase madrasah yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	Seksi Pendidikan Madrasah, Pontren, Penyelenggara Kristen	%	80,00	72
		2. Persentase sekolah keagamaan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran		%	63,98	72
		3. Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman;		%	40,00	40,00
		4. Persentase madrasah yang ramah anak.		%	60,00	30
		5. Persentase sekolah keagamaan yang ramah anak.		%	71,66	75
35	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan	1. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi Pendidikan Agama Islam, Penyelenggara Kristen	Madrasah	24	24
		2. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada sekolah keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan		Sekolah	4	4
		3. Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina		Unit	26	26

36	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	3. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	Subbagian Tata Usaha (Kepegawaian)	Kegiatan	1,00	1
37	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	1. Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja	Subbagian Tata Usaha (Kepegawaian)	%	100,00	100
		2. Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditandaklanjuti		%	100,00	100
		3. Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan		%	85,00	100
		4. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)		%	90,00	75,00
		5. Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya		%	90,00	85,00
		6. Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu		%	100,00	100
		7. Persentase data ASN yang diupdate		%	90,00	100
		8. Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses		%	100,00	100
38	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan	1. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	Subbagian Tata Usaha (Keuangan)	Dokumen	16	16
		2. Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)		%	100,00	95,00
		3. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal		%	100,00	99,36
		4. Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama		%	100,00	7,75

39	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel	1. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	Subbagian Tata Usaha (BMN)	%	100	100
		2. Persentase tanah yang bersertifikat		%	100	95.83
		3. Persentase nilai Opname Phisic (OP) BMN		%	100	100
40	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi	1. Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis	Subbagian Tata Usaha (Ortala)	%	70,00	100
		2. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi		%	70,00	100
		3. Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti		%	100,00	100
41	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	1. Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi	Subbagian Tata Usaha (Ortala)	%	80,00	N/A
		2. Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas		Satker	14,00	14
		3. Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja		Orang	10,00	N/A
42	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	1. Persentase output perencanaan yang berbasis data	Subbagian Tata Usaha (Perencanaan dan Humas)	%	100,00	68,24
		2. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra		%	70,00	66,00
		3. Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti		%	90,00	100
43	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran	1. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas	Subbagian Tata Usaha (Perencanaan)	%	90,00	95,83

		2. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti		%	70,00	73,02
44	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	Subbagian Tata Usaha (Pengadaan Barang dan Jasa)	%	70,00	99,16
45	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	1. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	Subbagian Tata Usaha (Umum, Pengadaan Barang dan Jasa)	%	90,00	92,00
		2. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik		%	70,00	85,00
		3. Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen		%	5,00	90,00
46	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga	1. Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan	Subbagian Tata Usaha (Kehumasan)	%	85,00	98,84
47	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi	1. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi	Subbagian Tata Usaha (Kehumasan)	Kegiatan	85	47
		2. Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter		%	95,00	90,00
48	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	1. Jumlah Sistem Informasi yang memenuhi standar	Subbagian Tata Usaha (Humas, Data, dan Informasi)	Unit	25,00	21,00
		2. Jumlah satuan kerja yang terhubung dalam satu jaringan dan internet		Satker	25,00	2,00
		3. Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable		%	85,00	75
49	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan	1. Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	Subbagian Tata Usaha (Keuangan)	Orang	442	442

		2. Jumlah dokumen penyusunan rencana program dan anggaran, keuangan, kepegawaian	Subbagian Tata Usaha (Perencanaan)	Dokumen	8	8
		3. Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang disediakan	Subbagian Tata Usaha (BMN)	Unit	71.598	71.598
		4. Jumlah layanan umum dan perlengkapan	Subbagian Tata Usaha (Umum)	Unit	34.305	34.305